

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*“semua orang ingin bahagia menjalani hidup di dunia ini”.*

*Iman J-Rock*

Saat ini masalah kemiskinan, merupakan pokok bahasan yang ‘peka’ untuk dibicarakan. Emil Salim (1982) menyebutkan, kemiskinan merupakan tema sentral dari perjuangan bangsa, dan motivasi fundamental dari cita-cita menciptakan masyarakat adil dan makmur. Para pakar ilmu sosial mempunyai perhatian besar terhadap rumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi nasional (makro) yang apabila berhasil akan dapat menghilangkan kemiskinan dengan sendirinya. Yang perlu adalah pendekatan interdisipliner untuk mengadakan penelitian, yang kemudian menyusun rekomendasi terpadu untuk mengatasinya (Munandar: 2009).

Semula, berabad lamanya, kemiskinan dianggap sebagai sebuah kewajaran yang tak perlu dipermasalahkan. struktur masyarakat yang berkembang pada saat itu membenarkan adanya dikotomi kaya-miskin, bahkan mendorongnya menjadi konstruksi-konstruksi struktural yang mengenal dan menyakinkan pikiran banyak pihak mengenai kebenaran hidup yang berkelas-kelas. Sebagian ajaran malah menyatakan bahwa semua itu adalah bagian dari hukum kodrat. Dikotomi kaya-miskin, dikatakan bukan tanggungjawab manusia, melainkan hanya refleksi saja dari apa yang telah terkodrat sebagai bagian dari takdir (Wignjosoebroto, 2005).

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang seringkali ditemukan di beberapa negara berkembang bahkan terkadang dapat pula ditemukan di negara maju. Sebagai masalah yang menjadi isu global di setiap Negara berkembang. Wacana kemiskinan dan pemberantasannya haruslah menjadi agenda wajib bagi para pemerintah dan pemimpin negara.

**Tabel 1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia tahun 2007-2010.**

Propinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2007	13.559.3	23.609.0	37 168.3	12.52	20.37	16.58
2008	12.768.5	22.194.8	34 963.3	11.65	18.93	15.42
2009	11 910.5	20 619.4	32 530.0	10.72	17.35	14.15
2010	11097.8	19925.6	31023.4	9.87	16.56	13.33

Sumber: data resmi BPS

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang seharusnya menjadikan masalah kemiskinan dan pemberantasannya sebagai agenda wajib bagi para pemerintah Indonesia. Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, menyebutkan bahwa pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin 37,17 juta atau 16.58%. Pada tahun 2008 menjadi 34,96 juta atau 15.42%. Lalu pada tahun 2009 turun menjadi 32,53 juta atau 14.15%. Dan semakin menurun pada tahun 2010, angka kemiskinan berada pada angka 31,02 juta atau 13.33%. Menurunnya angka kemiskinan dapat dilihat sebagai salah satu indikator positif akan perkembangan Indonesia dalam memerangi kemiskinan.

Kemiskinan dapat dilihat dari belum terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Hak-hak dasar tersebut antara lain adalah hak atas pangan, kesehatan, perumahan, pendidikan, pekerjaan, tanah, sumber daya alam, air bersih, dan sanitasi, rasa aman serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan

kebijakan publik dan proses pembangunan. Sedangkan dampak dari kemiskinan yaitu jutaan anak usia sekolah tidak biasa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya akses terhadap pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, tidak adanya investasi, dan tidak adanya perlindungan terhadap keluarga.

Khususnya di Surabaya sendiri, berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Surabaya tahun 2011, jumlah keluarga miskin (gakin) tercatat masih sebanyak 112.465 kepala keluarga (KK) atau sekitar 449.860 jiwa (estimasi 1 KK empat jiwa). Walaupun Tingkat kemiskinan di Surabaya sudah mengalami penurunan hingga 7% selama tahun 2010. Namun sayangnya tidak disebutkan berapa jumlah riil dari penurunan tersebut. Walikota Surabaya, Ir. Tri Rismaharini enggan mengungkapkan angka detailnya. "Saya tidak mau bicara soal angka. Yang pasti, prosentase penurunannya mencapai hingga 7 persen untuk tahun 2010 ini," tandas Risma. (<http://www.harianbhirawa.co.id>)

Kecamatan Rungkut adalah salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Surabaya Timur dengan luas wilayah 21,08 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 110.286 Jiwa, serta memiliki kepadatan penduduk sebanyak 5279 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Kecamatan Rungkut ditinjau dari variabel ekonomi termasuk sebagai kawasan dengan potensi industri besar yang tinggi. sedangkan apabila ditinjau dari variabel sosial demografi Kecamatan Rungkut termasuk daerah yang mempunyai fasilitas sosial yang cukup baik dan sebagai kantong-kantong urban /pendatang. Kedatangan migran (baik permanen maupun non-permanen) di daerah perkotaan berdampak positif maupun negatif, tergantung pada sudut pandang

masing-masing pihak terlibat. Dari sisi pelaku migrasi, melakukan mobilitas ke kota merupakan suatu hal yang positif karena mereka dapat memperoleh penghasilan/upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya perpindahan. Sebaliknya, arus migrasi ke kota yang cukup besar pada umumnya dipandang negatif bagi kepentingan kota yang memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas sosial, lingkungan, keindahan dan ketertiban. Pelaku migrasi ke kota (utamanya kelompok pendatang dengan kualitas rendah) menimbulkan berbagai masalah, antara lain berkembangnya kawasan permukiman kumuh, degradasi lingkungan, kerawanan sosial dan tindak kriminal, dan permasalahan pengangguran serta kemiskinan. Menurut data yang dirilis oleh BPS sebanyak 3.346 KK di Kecamatan Rungkut termasuk kategori miskin.

Menanggapi penurunan kemiskinan tersebut, Prof. Suahasil Nazara, Ph.D, Guru Besar FE UI dalam seminar 3 FE UI, juga mengemukakan “Adanya data bahwa dalam kurun waktu 2006-2010, angka kemiskinan terus menurun namun masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang memiliki pendapatan Rp 225.000/kapita/bulan” (<http://www.ui.ac.id>). Dapat dikatakan bahwasanya usaha untuk memerangi kemiskinan masih terus dilaksanakan dan menjadi program prioritas bagi pemerintah hingga saat ini.

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air

bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Semua orang menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Aristoteles (dalam Bertens, 1993) menyebutkan bahwa kebahagiaan merupakan tujuan utama dari eksistensi manusia di dunia. Sebagai manusia biasa dalam menjalani kehidupan kita pasti akan merasakan adanya perasaan bahagia dan perasaan sedih. Kita akan merasa bahagia saat sesuatu yang kita inginkan dapat kita capai dengan sebaik mungkin. Begitu pula sebaliknya, jika sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai dengan ataupun tidak tercapai maka yang akan kita rasakan adalah kesedihan. Begitulah yang kita rasakan selama ini dan mungkin akan kita rasakan juga selama kita hidup. Individu yang berpenghasilan rendah tentu akan memiliki ketidakmampuan terutama dalam pemenuhan kebutuhan yang berhubungan dengan kemampuan finansial mereka, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Selain secara finansial orang-orang miskin juga memiliki ketidakberdayaan secara psikologis.

Seligman (2005), melihat bahwa ditengah ketidakberdayaannya, manusia selalu memiliki kesempatan untuk melihat hidup secara lebih positif. Psikologi positif melihat manusia sebagai sosok yang mampu menentukan cara memandang kehidupan. Psikologi positif berpusat pada pemaknaan hidup, bagaimana manusia memaknai segala hal yang terjadi dalam dirinya, dimana pemaknaan ini bersifat sangat subyektif. Untuk itulah, pemaknaan hidup yang positif merupakan hal yang sangat penting agar manusia, dengan berbagai latar belakangnya. Dengan berbagai

subyektivitas yang dimilikinya, bisa meraih kebahagiaan atau disebut dengan istilah *subjective well-being*. (Arbiyah dkk, 2008)

Penelitian yang dilakukan oleh Parker dan Kleiner (dalam Arbiyah dkk, 2008) menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup dalam kemiskinan lebih cenderung merasa pesimis terhadap kemungkinan mereka untuk dapat berhasil. Adanya rasa pesimis yang terjadi pada masyarakat dalam memandang kemiskinan itu sendiri membuat masyarakat sulit berkembang dan sulit lepas dari jeratan kemiskinan yang dialaminya, padahal ketidakmampuan dan rasa pesimis tersebut tidak harus menyebabkan sebuah pemaknaan hidup yang negatif

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Cramm, dkk (2010) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara pendapatan terhadap *Subjective Well-being*. hal ini berarti semakin rendah tingkat pendapatan sebuah kelompok maka rendah pula *Subjective Well-being* yang dimiliki oleh kelompok tersebut, hal tersebut juga berlaku pada kelompok yang memiliki pendapatan yang sangat tinggi maka kelompok tersebut memiliki tingkat *Subjective Well-being* yang sangat tinggi

Diener, Lucas dan Oishi (2005) menyatakan bahwa *Subjective Well-being* merupakan konsep yang luas, meliputi : emosi, pengalaman menyenangkan, rendahnya tingkat *mood* negative, dan kepuasan hidup yang tinggi. Untuk itulah, pemaknaan hidup yang positif merupakan hal yang sangat penting agar manusia, yang dengan berbagai latar belakangnya bisa meraih kebahagiaan atau disebut dengan istilah *subjective well-being* (Arbiyah, dkk., 2008). Seseorang dikatakan memiliki *Subjective well-being* yang tinggi jika mereka merasa puas dengan

kondisi hidup mereka, sering merasakan emosi positif dan jarang merasakan emosi negatif. Selain itu Pivot & Diener (2004) menjelaskan bahwa *Subjective Well Being* merupakan salah satu predictor kualitas hidup individu karena *Subjective Well-Being* mempengaruhi penghasilan individu dalam berbagai domain kehidupan.

David Myers (2000) melaporkan sebuah survei yang dilakukan Pusat Penelitian Opini Nasional, yang telah menemukan bahwa 60 persen warga Amerika Serikat mendeskripsikan diri mereka sendiri sebagai “agak bahagia” dan 30 persen lainnya berkata bahwa mereka “sangat bahagia”. Hanya 10 persen yang berkata bahwa mereka “tidak terlalu bahagia”. Laporan kesejahteraan subjektif pada lebih dari sejuta orang di 45 negara menunjukkan bahwa rata-rata penilaian pribadi secara global atas kesejahteraan subjektif adalah mengesankan yaitu 6,75 dalam skala 10 angka (Myers & Diener, 1995; Myers, 2000).

Banyak studi yang telah dilakukan menemukan adanya korelasi positif antara pendapatan individu dengan *subjective well-being* (SWB) yang dimiliki (Diener dkk, 1992). Pada individu dengan pendapatan lebih besar memiliki skor *well-being* yang lebih tinggi dan lebih merasa bahagia daripada individu dengan pendapatan rendah. Dalam skala lebih luas pun juga menunjukkan hal yang sama, pendapatan dan hubungannya dengan *well-being* berkorelasi dalam konteks negara. Korelasi tersebut juga meliputi antar gender, tingkat pendidikan, dan kelompok etnis. Bagaimanapun juga, peningkatan pendapatan, baik secara individual maupun nasional akan memberikan dampak positif pada peningkatan SWB (Diener dkk, 1992).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hooghe & Vanhoutte (2011) menyatakan bahwa hidup bersama dengan pasangan serta memiliki hubungan pertemanan merupakan faktor yang cukup penting untuk menentukan *subjective well-being* seseorang. Saracino (2008) menyatakan bahwa modal sosial akan memberikan dampak positif terhadap *subjective well-being* (kesejahteraan subjektif) pada masyarakat yang tinggal di lingkungan berpendapatan rendah.

Sebuah penelitian yang dilakukan W. Yip, dkk (2007) di China menyatakan bahwa modal sosial yang dimiliki individu berpengaruh pada kesehatan dan *subjective well-being* (kesejahteraan subjektif) individu tersebut. Dari penelitian diketahui bahwa salah satu faktor yang mendukung *Subjective Well-Being* adalah modal sosial (*social capital*)

Modal sosial adalah penampilan organisasi sosial seperti jaringan-jaringan dan kepercayaan yang memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama (Putnam, 1993). sedangkan Fukuyama (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan dalam sebuah komunitas.

Robert Putnam, salah seorang pelopor modal sosial menyebutkan bahwa modal sosial mempunyai tiga pilar utama sebagai aset dalam pengembangan masyarakat. Ketiga pilar ini adalah kepercayaan, norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta jaringan sosial yang terjalin dalam sistem sosial (Winter 2000). Berbagai penelitian menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara modal sosial dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan keluarga miskin.



Penelitian yang dilakukan di tiga provinsi di Indonesia (Jambi, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur) menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki modal sosial yang tinggi mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam hal mengumpulkan aset fisik, menabung, dan memperoleh kredit guna meningkatkan kesejahteraannya (Grootaert 1999). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Skidmore (2001) bahwa beberapa tipe modal sosial dapat berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Konsep modal sosial (*social capital*) menjadi salah satu komponen penting untuk menunjang model pembangunan manusia karena dalam model ini, manusia ditempatkan sebagai subjek penting yang menentukan arah penyelenggaraan pembangunan. Keberadaan modal sosial juga menjadi penting dalam penanggulangan kemiskinan karena pengentasan kemiskinan tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tapi juga perluasan akses terhadap sumber-sumber daya kehidupan yang ditentukan pula oleh ketersediaan jejaring kerja (*network*) dan saling percaya (*mutual trust*) di kalangan masyarakat.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Individu yang berpenghasilan rendah tentu akan memiliki ketidakmampuan terutama dalam pemenuhan kebutuhan yang berhubungan dengan kemampuan finansial mereka, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Selain secara finansial orang-orang miskin juga memiliki ketidakberdayaan secara psikologis.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Cramm, dkk (2010) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara pendapatan terhadap *Subjective Well-being*. hal ini berarti semakin rendah tingkat pendapatan sebuah kelompok maka rendah pula *Subjective Well-being* yang dimiliki oleh kelompok tersebut, hal tersebut juga berlaku pada kelompok yang memiliki pendapatan yang sangat tinggi maka kelompok tersebut memiliki tingkat *Subjective Well-being* yang sangat tinggi

Selain pendapatan, faktor sosial-demografis seperti lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi *well-being* seseorang. Individu-individu yang tinggal di area lebih kaya memiliki skor *well-being* yang lebih tinggi daripada individu-individu di area yang lebih miskin (Diener dkk, 1992)

Dalam penelitian yang dilakukan Biswas Diener dan Ed Diener mengenai *Subjective well-being* (SWB) pada masyarakat di lingkungan miskin di Calcutta, India diperoleh hasil bahwa aspek kognitif yang mewakili kepuasan hidup memiliki skor yang relatif positif pada masyarakat di lingkungan miskin tersebut. Hal tersebut dimungkinkan karena responden menemukan kepuasan hidup dalam hal yang lebih spesifik daripada sumber-sumber material. Di samping itu aspek kognitif *Subjective well-being* (SWB) memiliki skor yang sedikit positif. Perbedaan skor kedua aspek tersebut dapat dikarenakan skala afeksi memiliki jangkauan waktu yang lebih sempit, dan lebih sensitif terhadap kejadian sehari-hari yang mempengaruhi emosi, seperti kunjungan teman ataupun mengalami hari buruk dalam pekerjaan, dimana munculnya berbagai kejadian itu tidak dapat dipastikan dan tidak selalu terjadi (Diener & Diener, 2001).

Selain faktor finansial, faktor modal sosial yang dimiliki juga mempengaruhi *well being* seseorang. Hooghe & Vanhoutte (2011) menyatakan bahwa bersama dengan pasangan serta memiliki hubungan pertemanan merupakan faktor yang cukup penting untuk menentukan *subjective well-being* seseorang. Sararacino (2008) menyatakan bahwa modal sosial akan memberikan dampak positif terhadap *subjective well-being* (kesejahteraan subjektif) pada masyarakat yang tinggal di lingkungan berpendapatan rendah. Sebuah penelitian yang dilakukan W. Yip, dkk (2007) di China menyatakan bahwa modal sosial yang dimiliki individu berpengaruh pada kesehatan dan *subjective well-being* (kesejahteraan subjektif) individu tersebut

Penelitian yang dilakukan di tiga provinsi di Indonesia (Jambi, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur) menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki modal sosial yang tinggi mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam hal mengumpulkan aset fisik, menabung, dan memperoleh kredit guna meningkatkan kesejahteraannya (Grootaert 1999).

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini mengkaji mengenai hubungan antara modal sosial (*social capital*) dengan *subjective well-being* (SWB) pada individu di lingkungan berpendapatan rendah. Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Subjective well-being* (SWB) adalah penilaian kognitif dan afektif seseorang atas hidupnya. Penilaian ini mencakup reaksi emosional

terhadap berbagai peristiwa atau kejadian yang dialami sebagaimana reaksi kognitif orang tersebut atas kepuasan dan pemenuhan hidup. Oleh karena itu SWB adalah konsep besar yang meliputi pengalaman emosi bahagia, kecenderungan suasana hati yang positif, dan kepuasan hidup yang tinggi. Pengalaman-pengalaman positif tersebut tergabung didalam tingkat SWB yang tinggi (Diener dkk, 2000).

2. Kemiskinan, Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.
3. Modal sosial adalah penampilan organisasi sosial seperti jaringan-jaringan dan kepercayaan yang memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama (Putnam, 1993).

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diungkapkan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah apakah ada hubungan antara modal

sosial (*social capital*) dengan *subjective well-being* (SWB) pada masyarakat miskin?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara modal sosial (*social capital*) dengan *subjective well-being* (SWB) pada individu di lingkungan berpendapatan rendah.

## **1.6. Manfaat penelitian**

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan pengetahuan yang berguna bagi pengembangan penelitian selanjutnya. Serta dapat memperkaya kajian dan wawasan dalam psikologi sosial dan psikologi positif, khususnya mengenai modal sosial (*social capital*) dan *subjective well-being* bagi akademisi ataupun siapa saja yang tertarik pada isu penelitian ini.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini:

1. Memberikan referensi untuk pengambilan kebijakan mengenai pemberdayaan modal sosial sehingga dapat mengembangkan *subjective well-being* individu.

2. Memberikan referensi bagi para psikolog komunitas atau pegiat pemberdayaan komunitas lainnya dalam menyusun pendekatan guna mengembangkan komunitas.